

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam tiap-tiap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas maka telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai dan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD tersebut. Untuk itu setiap perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renja guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Renja memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai yang tergolong masih sangat muda karena baru terbentuk pada Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pun diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas dan fungsi perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Banggai, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik,

layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Banggai, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Banggai, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten Banggai dan masyarakat lingkup Kabupaten Banggai.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui tahap-tahap perumusan dan penyajian dokumen dengan mengacu pada hasil analisis gambaran pelayanan, hasil evaluasi capaian Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai serta telaahan terhadap usulan program dan khususnya kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat perumusan program dan kegiatan prioritas untuk menjawab dan memecahkan permasalahan pembangunan / isu strategik bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini memberikan gambaran program dan kegiatan prioritas serta uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator kinerja baik keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, satuan, volume, target dan pagu indikatif pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2019.
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 370.a/ Sekretariat/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja Tahun 2019 ini juga dimaksudkan sebagai pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.
2. Untuk memudahkan dalam menetapkan beban atau target pada setiap sub unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.
5. Untuk memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja yang diharapkan dapat dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**, yang memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017, Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan awal tahun 2018, Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**, yang memaparkan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, yang memaparkan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019;
- Bab V Penutup**, yang berisikan tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, komitmen dan harapan dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2018

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dan Review Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2018 dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2018 yang sudah disahkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan Matriks Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sampai dengan tahun 2018, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dengan dicapainya 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Renja Tahun 2017. Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil dan keluaran sebesar Rp.8.985.922.279,- atau 99,20% dari total pagu anggaran program/ kegiatan yang ditetapkan sebesar Rp.9.057.988.279. Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Rencana Dinas Kominfo s/d dengan tahun 2018
Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.10	Komunikasi dan Informatika									
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01.01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	5.920 Lembar	-	1.500	1.500	100	1.000	1.000	100
01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan air, listrik, dan internet	5 Jaringan	-	5	5				
01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	3 Org	-	3	3	100	3	3	100
		Jumlah peralatan kebersihan/ bahan pembersih	15 Jenis	-	15	15	100	15	15	100
01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	22 Jenis	-	22	22	100	22	22	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	186 Blok	-	15	15	100	15	15	100
		Jumlah fotocopy berkas	194.000 Lembar	-	40	40	100	40	40	100
		Jumlah jilid berkas/ dokumen	106 Buku	-	25	25	100	25	25	100
01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik	26 Jenis	-	5	5	100	6	6	100
01.15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	6 Terbitan	-	4	4	100	4	4	100
01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan	5.795 Dos	-	1.160	1.160	100	850	850	100
01.18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	5 Ls	-	1	1	100	1	1	100
01.19	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	5 Ls	-	1	1	100	1	1	100
01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	148 Org	-	36	36	100	10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02.05	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua	29 Unit	-	7	7	100	-	-	-
02.07	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	26 Jenis	-	9	9	100	5	5	100
02.09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	27 Jenis	-	6	6	100	4	4	100
02.10	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diadakan	18 Jenis	-	9	9	100	-	-	-
02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	27 Unit	-	-	-	-	2	2	100
02.26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung ktr	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	13 Unit	-	3	3	100	10	10	100
02.28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	30 Unit	-	10	10	100	10	10	100
02.42	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah komponen gedung kantor yang direhabilitasi	2 Komponen	-	2	2	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur									
03.02	Kegiatan Penyediaan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	151 Pasang	-	39	39	100	-	-	-
03.05	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	356 Pasang	-	78	78	100	80	80	100
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi	18 Org	-	2	2	100	4	4	100
05.04	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	100
06.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan Laporan TEPPRA yang tersusun secara akuntabel	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.03	Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan & laporan prognosis yang tersusun	52 Dokumen	-	13	13	100	13	13	100
06.04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun	5 Dokumen	-	1	1	100	1	1	100
06.05	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	28 Dokumen	-	5	5	100	7	7	100
06.08	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan monev yang tersusun	25 Laporan	-	1	1	100	-	-	-
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			-						
15.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah infrastruktur dan sarana TIK yang dibangun/ dikembangkan	21 Jenis	-	10	10	100	2	2	100
15.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan pengembangan Jaringan dan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	1 Kegiatan	-	1	1	100	-	-	-
15.04	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio/ komunikasi yang diadakan	11 Jenis	-	2	2	100	3	3	100
15.08	Kegiatan Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan publikasi	2 Kegiatan	-	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Program Kerjasama dengan Mass Media									
18.02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Media	-	2	2	100	2	2	100
18.05	Kegiatan Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan menggunakan Media Elektronik/Radio	Jumlah layanan Informasi yang diselenggarakan dengan menggunakan media radio	1 kegiatan	-	1	1	100	1	1	100
18.13	Kegiatan Melaksanakan pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial	Jumlah kegiatan mendukung pengembangan KIM	6 Kegiatan	-	1	1	100	1	1	100
02.15	Urusan Persandian									
19	Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi lainnya									
19.02	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi sandi telematika dan informasi teknologi lainnya	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi	7 OPD	-	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Karenanya, sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran perangkat daerah.

Dari hasil pengukuran kinerja pelayanan pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat mencapai tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. Namun, dari kualitas kinerja pelayanan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal, karena ditemukan masih adanya masalah yang muncul seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dalam hal ini jumlah pegawai belum memenuhi formasi yang dibutuhkan sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan memperhatikan ketersediaan SDM, kinerja pelayanan birokrasi dan kondisi kepegawaian berdasar kuantitas dan kualitas pendidikan yang ada saat ini masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Terlebih lagi dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency*. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	-	-	-	19,64%	21,43%	25%	28,57%	58,93%	19,64%	21,43%	25%	28,57%	
2.	Cakupan penerima manfaat layanan informasi pemerintah daerah	-	-	-	-	-	96%	98,15%	100%	-	-	96%	98,15%	
3.	Persentase penurunan penyebaran informasi tidak benar / berita bohong (Hoaks)	-	-	-	30%	25%	20%	15%	10%	30%	25%	20%	15%	
4.	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi dengan baik	-	-	-	10,71%	12,50%	17,86%	26,79%	32,14%	10,71%	12,50%	17,86%	26,79%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang masih akan dihadapi dalam periode pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2019. Ada beberapa isu penting yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pencapaian sasaran kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar diperkirakan masih akan menjadi isu penting yang dihadapi pada tahun 2019. Untuk jelasnya, permasalahan mendasar tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Balantak Utara, pesisir utara Kecamatan Bunta dan beberapa desa yang terletak di Kecamatan Lobu.

2. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government. Selain itu, terbatasnya SDM tenaga teknis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan data dan informasi berbasis elektronik pada perangkat daerah. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya

pemuktahiran data perangkat daerah dan belum tersosialisasikannya e-government pada perangkat daerah.

3. Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi teknis seperti lembaga penyiaran lokal, Papan Reklame, Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih ada masyarakat pemohon belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi secara teknis.

4. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat.

5. Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

6. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

7. Diseminasi Data Statistik Sektor

Masih belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral dipengaruhi SDM aparatur bidang statistik yang terbatas dan belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral pada perangkat-perangkat daerah yang terkait.

8. Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server yang memadai, media center, ruang workshop, ruang kerja pegawai.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selanjutnya proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Bupati Banggai. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Renja Tahun 2019 perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 kami sajikan dalam bentuk matrik tabel yang dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Terkait hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menelaah usulan-usulan kegiatan dari masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa usulan seperti Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) bukan merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika melainkan kewenangan dari PT.Telkom maupun pihak provider. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan konfirmasi atas usulan-usulan tersebut dan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan fasilitasi usulan ke PT.Telkom ataupun pihak provider (swasta).
2. Masih banyak informasi atas usulan kegiatan yang belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan konfirmasi atas usulan-usulan yang belum lengkap tersebut. Ada beberapa usulan yang diberi catatan untuk dikonfirmasi kembali sesuai dengan hasil kajian teknis dan analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Kebanyakan usulan kegiatan masyarakat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Di antaranya adalah usulan pengadaan internet desa (wifi publik) dan bantuan alat penguat sinyal. Hal ini jelas sangat berkaitan dengan isu strategis yaitu masih terbatasnya infrastruktur dasar dan sarana penunjang informasi dan komunikasi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2019, disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembangunan Tower Telekomunikasi (BTS)	Kec. Balantak Utara	Jumlah BTS	1 Unit	Diskominfo akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan PT.Telkom karena kewenangan pembangunan menara telekomunikasi ada pada penyedia layanan jaringan telekomunikasi/ provider dan PT.Telkom selaku BUMN
		Desa Nanga-nangaon Kec. Bunta		1 Unit	
		Dusun. I, II dan III Desa Tuntung		1 Unit	
		Desa Teku, Balantak Utara		1 Unit	
2	Pemasangan Internet / Wifi	13 Desa Luwuk Timur	Jaringan Internet	1 Paket	Difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Dinas PMD agar dapat dianggarkan melalui APBDesa / ADD
		Desa Dondo Kec.Balantak Selatan		1 Paket	
		Desa Sepe, Kec.Balantak Selatan		1 Paket	
		Ds I dan II, Desa Resarna, Kec.Balantak Selatan		1 Paket	
		Dsn I dan II, Desa Giwang, Kec.Balantak Selatan		1 Paket	
		Desa Gorontalo, Kec.Balantak Selatan		1 Paket	
		Kantor Desa Teku, Balantak Utara		1 Paket	
		Desa Salodik, Kec.Luwuk Utara		1 Paket	
		Kantor Camat Balantak		1 Paket	Diperlukan Kajian teknokratis dan SID (Survey, Identification, Design)
		Kantor Camat Simpang Raya		1 Paket	
		Kantor Camat Mantoh		1 Paket	
3	Pembuatan Website	Kecamatan Kintom	Jumlah Situs Web	1 Paket	Sudah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun 2018
4	Warung Internet Desa	Kelurahan Dale-Dale, Kec.Balantak	WIM	1 Paket	Dukungan fasilitasi melalui kegiatan Warung Informasi Masyarakat (WIM)
5	Pengadaan Penguat Sinyal Telepon	Kantor Desa Taima	Repeater	1 Unit	Difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Dinas PMD agar dapat dianggarkan melalui APBDesa / ADD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain : 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal; 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman; 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika; 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi; 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran; c) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran; d) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah: 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan. 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman. 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemkominfo akan mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumber daya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan.

Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019. Kebijakan nasional terkait pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang tertuang dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal) dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional
1.	<p>Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;e.Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; e) Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; f) Kampanye publik terkait revolusi mental; g) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; h) Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; i) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP); Dewan Pers; dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2.	<p>Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;dan c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Mewujudkan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana yang dimaksud dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai memang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, niscaya kondisi tersebut akan bisa terwujud. Oleh karena itu, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, dan mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2021. Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency.
2. Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana tahunan yang sifatnya menyeluruh. Adapun sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.
2. Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Tabel 3.2** berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency	Tingkat layanan komunikasi dan informatika	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Layanan Komunikasi dan Informatika

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banggai, pengembangan daerah yang terisolir jaringan telekomunikasi (*blankspot area*), pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 terdiri dari 13 Program dan 52 Kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu anggaran indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebesar Rp.6.500.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 2** (Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Mengacu pada program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan keselarasan pada visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai serta mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan data antar perangkat daerah.
2. Mengembangkan teknologi informasi untuk antisipasi kerusakan data.
2. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan SDM bidang TIK untuk mendukung pengelolaan data dan informasi serta penyebarluasannya.
4. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat.
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik.
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

4.2. Pendanaan

Sebagaimana kebijakan penyusunan APBD yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, secara indikatif pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 akan bersumber dari APBD Kabupaten Banggai.

Total kebutuhan dana/pagu anggaran Belanja Langsung indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebesar Rp.6.500.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
2. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
3. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut : Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan uang harian dibayarkan secara lumpsum.
5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan penyelenggaraannya secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran .
6. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

7. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 2** (Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020).

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini adalah salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 serta memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan (*output*) dan indikator program (*outcome*) ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 13 program dan 52 kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 ini dengan efektif dan efisien.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
3. Hasil kinerja dari pelaksanaan Renja Tahun 2019 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat keberhasilan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja pelayanan dan pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dapat terukur dan berkesinambungan.

Demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini untuk dipedomani pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika akan maksimal bila semua perangkat aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen kita bersama dan mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebab kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Amin

Luwuk, 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

Drs. DJAYADIN, MM
NIP.19611113 198903 1 005